

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Menyusun kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan Provinsi dan menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi, tata laksana, dan aparatur serta pelayanan administratif kepada perangkat daerah.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien.				Indek Reformasi Birokrasi		
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintah Daerah			Indeks Kualitas Kebijakan		
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah		1. Efektifitas Kerjasama Daerah 2. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan	Program Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
				Tersusunnya dokumen kebijakan pemerintahan daerah yang berkualitas	Persentase pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilaksanakan	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan	Pengelolaan administrasi kebijakan pemerintahan	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi hasil pelaksanaan pemerintahan umum	Fasilitasi Pelaksanaan pemerintahan umum	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi penataan wilayah	Fasilitasi penataan wilayah	
					Persentase pelaksanaan otonomi daerah yang difasilitasi	Pelaksanaan Otonomi Daerah	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Fasilitasi administrasi Kepala Daerah dan DPRD	
					Jumlah dokumen hasil pengembangan otonomi dan penataan urusan yang dilaksanakan	Pengembangan otonomi dan penataan urusan	

					Jumlah laporan hasil evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan	Evaluasi dan penyelenggaraan pemerintahan	
					Persentase peningkatan MoU yang difasilitasi	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	
					Jumlah kerja sama antar pemerintah yang difasilitasi	Fasilitasi kerja sama antar pemerintah	
					Jumlah kerja sama badan usaha/swasta yang difasilitasi	Fasilitasi kerja sama badan usaha/swasta	
					Jumlah kerja sama yang dievaluasi	Evaluasi pelaksanaan kerja sama	
			Meningkatnya Kualitas Produk Hukum yang Dihasilkan		Persentase produk hukum yang dihasilkan	Program Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Biro Hukum dan HAM
				Tersusunnya produk hukum daerah yang sesuai dengan standar peraturan perundang-undangan	Persentase penetapan peraturan perundang-undangan yang sesuai ketentuan yang berlaku	Fasilitasi Penyusunan dan Perundang-Undangan	
					Jumlah produk hukum pengaturan yang disusun	Fasilitasi penyusunan produk hukum pengaturan	
					Jumlah produk hukum penetapan yang disusun	Fasilitasi penyusunan produk hukum penetapan	
					Jumlah produk hukum yang didokumentasi dan dikelola informasinya	Pendokumentasian produk hukum dan naskah hukum lainnya	
					Jumlah produk hukum kabupaten/kota yang difasilitasi dan dievaluasi	Fasilitasi dan evaluasi produk hukum kab/kota	
					Persentase bantuan hukum yang difasilitasi	Fasilitasi Bantuan Hukum	
					Jumlah masalah hukum yang diselesaikan	Fasilitasi penyelesaian masalah hukum	
					Jumlah masalah non litigasi dan HAM yang diselesaikan	Fasilitasi penyelesaian masalah non litigasi dan HAM	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		Efektivitas pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat	Program Kesejahteraan Rakyat	Biro Kesejahteraan Rakyat
				Tersusunnya dokumen kebijakan dan regulasi di bidang kesejahteraan rakyat	Persentase fasilitasi pembinaan mental spritual	Fasilitasi pembinaan mental spritual	

					Jumlah sarana dan prasarana spiritual yang dikelola	Pengelolaan sarana dan prasarana spiritual	
					Jumlah lembaga bina spiritual yang difasilitasi	Fasilitasi kelembagaan bina spiritual	
					Persentase fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar yang	Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat pelayanan dasar	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan	Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pendidikan	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesehatan	Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kesehatan	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang sosial	Fasilitasi koordinasi, sinkronisasi, evaluasi dan capaian kinerja kebijakan kesejahteraan rakyat bidang sosial	
					Persentase fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar yang difasilitasi	Fasilitasi pengembangan kesejahteraan rakyat non pelayanan dasar	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, transmigrasi dan tenaga kerja	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan perhubungan	Koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kesejahteraan rakyat bidang komunikasi, informatika, statistik, persandian, dan perhubungan	

			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pengeloaan Perekonomian dan Pembangunan		Efektivitas pelaksanaan kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan	Biro Perekonomian
				Tersusunnya dokumen kebijakan perekonomian dan pembangunan yang selaras dengan RPJMD	Persentase data informasi pembangunan ekonomi yang tersedia	Pengelolaan kebijakan dan koordinasi perekonomian	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan kebijakan ekonomi	Fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi makro	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan kebijakan ekonomi	Fasilitasi pengelolaan kebijakan ekonomi mikro	
					Persentase koordinasi sektor sumber daya alam yang terselenggara dengan baik	Pengelolaan kebijakan dan koordinasi sumber daya alam	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertanian, kehutanan, kelautan, dan perikanan	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pertambangan dan lingkungan hidup	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan energi dan air	
					Persentase BUMD yang memberikan kontribusi kepada PAD	Pengelolaan kebijakan dan koordinasi BUMD dan BLUD	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring , dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD jasa keuangan dan aneka usaha	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah jasa keuangan dan aneka usaha	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring , dan evaluasi kebijakan pengelolaan BUMD air minum, limbah dan sanitasi	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah air minum, limbah dan sanitasi	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BUMD	

					Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, monitoring , dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Koordinasi, sinkronisasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	
					Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BLUD	Koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan pendirian BLUD	
			Meningkatnya Kualitas Kebijakan Administrasi Pembangunan		Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan	Program Kebijakan Administrasi Pembangunan	Biro Administrasi Pembangunan
				Tersusunnya dokumen kebijakan administrasi pembangunan yang sesuai dengan standar perencanaan dan regulasi nasional maupun daerah	Persentase peningkatan pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBD	
					Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan APBN	
					Jumlah laporan hasil pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah	Pengendalian administrasi pelaksanaan pembangunan Wilayah	
					Persentase peningkatan pelaporan administrasi pelaksanaan pembangunan daerah	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah dokumen hasil analisis capaian kinerja pembangunan daerah yang disediakan	Analisis capaian kinerja pembangunan daerah	
					Jumlah laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	Fasilitasi perumusan kebijakan teknis pembangunan daerah	
		Meningkatnya Tata Kelola dan Akuntabilitas Perangkat Daerah			Indeks Pelayanan Publik		

			Meningkatnya Kualitas Layanan Pengadaan Barang dan Jasa		Indeks Tata Kelola Pengadaan	Program Kebijakan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
				Tersedianya layanan pendampingan dan fasilitasi bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa	Persentase pengelolaan pengadaan barang dan jasa	Pengelolaan pengadaan barang dan jasa	
					Jumlah laporan hasil strategi pengadaan barang dan jasa	Pengelolaan Strategi pengadaan barang dan jasa	
					Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa	
					Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	Pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa	
					Persentase pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa	Pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik	
					Jumlah laporan pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	Pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik	
					Jumlah laporan pengembangan sistem informasi pengedaan barang dan jasa	Pengembangan sistem informasi pengadaan barang dan jasa	
					Jumlah laporan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	Pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa	
					Persentase pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	Pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa	
					Jumlah orang yang mengikuti pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	Pembinaan sumber daya manusia pengadaan barang dan jasa	
					Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	Pembinaan kelembagaan pengadaan barang dan jasa	

					Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	Pendampingan, konsultasi, dan/atau Bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa	
			Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Pemerintah Daerah		Indeks Kematangan Organisasi	Program Penataan Organisasi	Biro Organisasi
				Terlaksananya implementasi reformasi birokrasi	Persentase peningkatan fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
					Jumlah dokumen hasil penataan kelembagaan Provinsi	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi pentaan kelembagaan kabupaten/kota	Fasilitasi penataan kelembagaan Kabupaten/kota	
					Jumlah dokumen hasil pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jabatan	Penataan analisis jabatan	
					Persentase peningkatan fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja	Fasilitasi Reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja	
					Jumlah dokumen hasil pelaksanaan reformasi birokrasi	Pembinaan pelaksanaan reformasi birokrasi	
					Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja	Monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja	
					Jumlah laporan hasil evaluasi pelaksanaan budaya kerja	Evaluasi pelaksanaan budaya kerja	
					Jumlah dokumen hasil pengelolaan tata laksana pemerintahan	Pengelolaan tata laksana pemerintahan	
					Jumlah dokumen hasil fasilitasi peningkatan pelayanan publik	Fasilitasi peningkatan pelayanan publik	

			Meningkatnya Pelayanan Publik		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Biro Umum dan Perlengkapan
				Tersedianya kualitas sarana dan prasarana pelayanan publik	Persentase peningkatan perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	

					Jumlah Dokumen Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester an SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semest eran SKPD	
					Persentase Peningkatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Persentase Peningkatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-Undangan	

					Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Persentase Peningkatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
					Persentase Peningkatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Unit Alat besar yang disediakan	Pengadaan Alat Besar	
					Jumlah Paket Mebel yang disediakan	Pengadaan Mebel	

					Jumlah unit sarana dan prasarana kantor dan bangunan lainnya yang disediakan	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Persentase Peningkatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
					Persentase Peningkatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah mebel dipelihara	Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

					Persentase Peningkatan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan KDH dan WKDH	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah orang yang mengikuti Medical Chek Up KDH dan WKDH	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket pakaian dinas dan atribut kelengkapan KDH dan WKDH yang disediakan	Penyediaan pakaian dinas dan atribut kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Orang yang menerima Dana Penunjang Operasional KDH dan WKDH	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Persentase Peningkatan Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang disediakan	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	
			Meningkatnya Pelayanan Publik		Persentase pemenuhan layanan kinerja perangkat daerah	Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi	Biro Humas dan Protokol
				Tersedianya Inovasi Pelayanan Publik	Persentase Peningkatan Fasilitas Materi dan Komunikasi Pimpinan	Kegiatan Materi dan Komunikasi Pimpinan	
					Jumlah Dokumen Materi Pimpinan Yang Disiapkan	Sub Penyiapan Materi pimpinan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Komunikasi Pimpinan	Sub Fasilitas Komunikasi Pimpinan	

					Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Sub Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	
					Persentase Peningkatan Fasilitas Keprotokolan	Kegiatan Fasilitas Keprotokolan	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Sub Fasilitas dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	
					Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah	Sub Fasilitas Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Sub Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	